

P D R B
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN
TRIWULAN III 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH



P D R B
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO

PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN
TRIWULAN III 2023





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN
TRIWULAN III 2023

Katalog BPS : 9302020.11
Nomor Publikasi : 11000.2360
Nomor ISSN : 2502.0889
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 65 Halaman
Naskah : BPS Provinsi Aceh
Penyunting : BPS Provinsi Aceh
Gambar Sampul : BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan Oleh:

© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik*



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

TRIWULAN III 2023

Tim Penyusun

Penanggung Jawab/Pengarah : Ahmadriswan Nasution
Editor : Tasdik Ilhamudin
Hendra Dharmawan
Penulis : Mazaya Alifah Syadzwina
Pengolah Data & Grafik : Hendra Dharmawan
Mazaya Alifah Syadzwina
Cover dan Infografis : Mazaya Alifah Syadzwina

<https://aceh.bps.go.id>

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



KATA PENGANTAR

Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB dilihat dari sisi pengeluaran dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2023 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 2023
Kepala BPS Provinsi Aceh



Ahmadriswan Nasution



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



RINGKASAN

Perekonomian Aceh secara y-on-y pada triwulan III tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen, dengan nilai PDRB ADHK sebesar 36,59 triliun rupiah meningkat sekitar 1,32 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan III tahun 2022. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2023 diperoleh sebesar 57,13 triliun rupiah juga mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan III tahun 2022 yang hanya mencapai 53,77 triliun rupiah, hal ini berarti meningkat sekitar 3,36 triliun rupiah.

Kondisi perekonomian Aceh kumulatif dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 dibandingkan kumulatif dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sekitar 4,50 persen. Triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2023 nilai PDRB ADHB mencapai 167,28 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 13,51 triliun rupiah dibandingkan dengan kondisi triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 yang hanya mencapai 153,77 triliun rupiah. Secara ADHK, nilai PDRB triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 mencapai 107,67 triliun rupiah mengalami kenaikan sekitar 4,38 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 yaitu hanya sebesar 103,29 triliun rupiah.

Tinjauan ekonomi Aceh secara triwulanan (q-to-q) yaitu perkembangan nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023. Nilai PDRB ADHK pada triwulan III tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 0,52 triliun rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK pada triwulan II tahun 2023. Dengan kata lain ekonomi Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen secara q-to-q pada triwulan III tahun 2023.

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, komponen impor barang dan jasa merupakan komponen pengurang terhadap PDRB total. Pada triwulan III tahun 2023, nilai PDRB komponen impor barang dan jasa menjadi komponen yang paling tinggi, baik secara ADHB maupun



ADHK 2010. Selanjutnya diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang menduduki peringkat kedua.

Perkembangan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan III tahun 2023 secara tahunan (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,50 persen dibanding dengan triwulan III tahun 2022. Secara q-to-q, ekonomi regional Sumatera mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,89 persen. Hampir semua provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan. Secara c-to-c, yaitu kondisi kumulatif triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 dibandingkan dengan kumulatif triwulan I sampai triwulan III tahun 2022, ekonomi regional Sumatera juga mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 4,72 persen.

Nilai ICOR triwulan III pada tahun berjalan (metode standar) untuk Regional Sumatera dapat diperhatikan bahwa bernilai fluktuatif dan terdapat beberapa nilai ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, terutama pada triwulan III tahun 2020. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan juga nilai ICOR secara periodik (metode akumulasi) untuk menghindari terdapatnya nilai ICOR yang ekstrim. Gambar 14 menunjukkan bahwa nilai ICOR akumulasi Pulau Sumatera beserta dengan masing-masing provinsi periode triwulan III tahun 2018-2023. ICOR Regional Sumatera bernilai sebesar 4,78 yang didapatkan dari perbandingan total PMTB dan perubahan total PDRB ADHB provinsi yang ada di wilayah Regional Sumatera periode triwulan III tahun 2018-2023. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara umum, Regional Sumatera membutuhkan 4,78 unit PMTB untuk mampu menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode tersebut.

Nilai ICOR Regional Sumatera metode akumulasi diperoleh sebesar 4,78 yang didapatkan dari perbandingan total PMTB dan perubahan total PDRB ADHB provinsi yang ada di wilayah Regional Sumatera. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata, Regional Sumatera membutuhkan 4,78 unit PMTB untuk mampu menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode triwulan III tahun 2018-2023.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Ringkasan	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar dan Tabel	xi
Daftar Lampiran	xiii
I. Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Ruang Lingkup	4
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.2.2 Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga....	5
1.2.3 Konsumsi Pemerintah	6
1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	7
1.2.5 Perubahan Inventori	9
1.2.6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	11
1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	11
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah	11
1.3 Indikator Ekonomi <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	12
Infografis 1	21
II. Tinjauan PDRB Provinsi Aceh	25
2.1 Nilai PDRB Total dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh	25
2.2 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran	26
Infografis 2	29
III. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran	33
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i>	33
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i>	36
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>c-to-c</i>	37
3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera	38





Infografis 3.....	43
Infografis 4.....	45
IV. Analisis ICOR	49
Lampiran	57
Daftar Pustaka	65

<https://aceh.bps.go.id>





DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 (Triliun Rupiah) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen)	25
Gambar 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan III Tahun 2023 (Triliun Rupiah)	27
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>y-on-y</i> dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2023 (persen)	33
Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> (Persen)	35
Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> (Persen)	36
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran Provinsi Aceh <i>c-to-c</i> (Persen).....	37
Gambar 7. Pertumbuhan PDRB (<i>y-on-y</i>) Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 (Persen)	38
Gambar 8. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 <i>y-on-y</i> (Persen)	39
Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB <i>q-to-q</i> Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 (persen).....	40
Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB <i>c-to-c</i> Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 (persen).....	41
Gambar 11. <i>ICOR</i> dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (<i>y-on-y</i>) Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2018-2023	50
Gambar 12. <i>ICOR</i> dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (<i>y-on-y</i>) Indonesia Triwulan III Tahun 2018-2023	51



Gambar 13.	Perbandingan <i>ICOR</i> Aceh dan Indonesia Triwulan III Tahun 2018-2023 (<i>y-on-y</i>).....	52
Gambar 14.	<i>ICOR</i> Provinsi di Wilayah Sumatera Metode Akumulasi Triwulan III Tahun 2018-2023 (<i>y-on-y</i>)	54
Tabel 1.	Perkembangan Nilai <i>ICOR</i> Provinsi di Sumatera Periode Triwulan III Tahun 2018-2023	53

<https://aceh.bps.go.id>





DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Triliun Rupiah)	57
Lampiran 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Triliun Rupiah)	57
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2022 sampai Triwulanan-2023 (Persen).....	58
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen).....	58
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan <i>q-to-q</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)	59
Lampiran 6. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan.....	59
Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)	60
Lampiran 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan 2022-2023	60
Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen).....	61
Lampiran 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan III-2023	61

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



<https://aceh.bps.go.id>

PENDAHULUAN

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijakan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan (Sukirno, 2006). Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran.



Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun PDRB mulai triwulan IV tahun 2014 telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perubahan tersebut seperti peningkatan penggunaan teknologi dan perkembangan jenis pekerjaan.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain :

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya.
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.





Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *babysitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dan sejenisnya), perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri. Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah tangga, digunakan hasil Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT) sebagai data pokok. Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumah tangga triwulanan didasarkan pada data SKKRT, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun dimana data belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

1.2.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga

Pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.



- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu:

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi profesi (Orprof) dan serikat buruh,
4. Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi,
5. Partai Politik,
6. Lembaga keagamaan,

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu:

1. Perumahan,
2. Kesehatan,
3. Rekreasi, kebudayaan, dan olahraga,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/jaminan sosial,
6. Keagamaan,
7. Partai politik, organisasi buruh dan organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa lainnya.

Perkiraan besarnya konsumsi LNPRT didasarkan pada data Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Triwulanan, selain data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.

1.2.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Adapun pada sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan output





pemerintah, sehingga PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Kegiatan *social transfer in kind purchased market production* juga masuk ke dalam PKP. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 2008, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri. Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB seri baru ini PKP diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

Adapun sumber data yang dipakai untuk memperkirakan besarnya PKP adalah data APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari kementerian keuangan, APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari Dinas Keuangan Kabupaten/Kota, dan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dari Desa hasil Survei K3.

1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nopirin (2000) menjelaskan, investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004). Menurut Tambunan (2001), di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).





Menurut definisi dari BPS, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal,
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal,
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, monumen, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air.
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari:
 - a. Alat-alat transportasi, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain-lain,
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
 - c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
 - d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.





- e. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.
3. Budidaya sumber daya hayati.
 4. Produk kekayaan intelektual meliputi: *research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan *database*, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.
 5. Sistem persenjataan.
 6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.
 7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
 8. Margin pedagang atau makelar jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas.
 9. Barang modal lainnya.

Adapun sumber data dalam memperkirakan nilai PMTB adalah terdiri dari data realisasi investasi dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), data impor mesin HS 2 digit, serta dari fenomena dan sumber lainnya.

1.2.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau





belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.





1.2.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga *free on board* atau f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction* dan *direct purchase non-resident* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa (BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik Ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction*, *direct purchase* penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik Impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.2.8 Net Ekspor Antardaerah

Nilai net ekspor antar daerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antar daerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah. Adapun perkiraan nilai *net* ekspor antar daerah saat ini menggunakan metode *Cross Houlling*.



1.3 Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Dalam teori ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor produksi yang penting, di samping faktor produksi sumber daya manusia, dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah karena investasi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan kapasitas produksi yang meningkat, yaitu misalnya karena investasi digunakan untuk membeli atau menambah barang-barang modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, maka hasil-hasil produksi di wilayah tersebut diharapkan juga akan meningkat (Mankiw, 2001).

Ukuran kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi suatu target pendapatan wilayah atau laju pertumbuhan ekonomi tertentu diberikan oleh suatu ukuran atau indikator ekonomi yang disebut sebagai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Dengan ICOR, perkiraan kebutuhan investasi dapat diperkirakan untuk mencapai suatu tingkat kinerja ekonomi yang ditetapkan karena ICOR merupakan ukuran atau indikator makro yang menghubungkan antara investasi dengan pendapatan wilayah.

Variabel ICOR memiliki pola hubungan logaritma-linier dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif signifikan. Artinya apabila ICOR naik maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila ICOR turun maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan (Siwu, dkk, 2021).

Salah satu komponen PDRB menurut pengeluaran yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB menjelaskan besarnya realisasi investasi fisik yang telah dilakukan, investasi fisik terdiri dari investasi yang dilakukan untuk membeli atau menambah atau memperbaiki barang-barang modal seperti bangunan (tempat tinggal dan bukan tempat tinggal), mesin-mesin dan peralatannya, kendaraan, dan melakukan pekerjaan investasi fisik lainnya seperti reklamasi lahan, pemerataan lahan untuk kantor, dan sebagainya.



Nuryadin dan Sodik (2012) dalam jurnal *Penyusunan Indikator Ekonomi Incremental Capital Output Ratio 2011*, secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung *ICOR* adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta k}{\Delta Y} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

Δk adalah investasi, atau barang modal baru, penambahan kapasitas terpasang

ΔY adalah pertambahan/pertumbuhan *output*

Dalam praktik, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya investasi yang ditanamkan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta k = I$ (I = investasi), begitu juga dengan *output* yang diasumsikan sebagai nilai PDRB karena keterbatasan data nilai antara, maka rumus (1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots(2)$$

Rumus (2) ini disebut dengan *Gross ICOR*. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai, karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap. Dalam beberapa hal, untuk kasus-kasus tertentu investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

I_t adalah investasi pada tahun ke- t ; (dalam hal ini adalah PMTB tahun ke- t)

Y_t adalah *output* pada tahun ke- t ; (PDRB menurut pengeluaran tahun ke- t)

Y_{t-1} adalah *output* pada tahun ke- $t-1$; (PDRB menurut pengeluaran tahun $t-1$)

Rumus (3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke t akan menimbulkan *output* (dalam hal ini PDRB) pada tahun t itu juga.



Koefisien *ICOR* negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum memproduksi atau telah memproduksi tetapi *output* yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan *output* tahun sebelumnya. Sehingga selisih *output* antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien *ICOR*-pun menjadi negatif. Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan *output* secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi apabila ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi. Koefisien *ICOR* yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan *output* yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan *output* pada tahun sebelumnya, atau tambahan *output* yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga tidak efisien dan menghasilkan koefisien *ICOR* yang relatif besar. Widodo dalam (Situmorang, 2011) menyatakan bahwa secara umum, nilai *ICOR* yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3–4.

Penghitungan *ICOR* dapat dilakukan dengan metode akumulasi yaitu berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan *output* selama periode waktu *t* disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu *t*. Perumusan *ICOR* dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan *output* selama periode waktu *t*1 sampai *t*_n yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots \dots \dots (4)$$



Kelebihan dari metode akumulasi adalah dalam penerapannya metode ini terkandung

prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien *ICOR* ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Akan tetapi metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi tidak bisa mencerminkan *inefficiency* yang memang terjadi dalam praktek.

Walaupun penambahan *output* sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan *ICOR* ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi *output* selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan. Penghitungan *ICOR* dalam publikasi ini dilihat pada kondisi triwulan I periode tahun 2017-2023 menggunakan metode akumulasi yaitu rumus (4), sementara untuk *ICOR* triwulan I setiap tahunnya menggunakan metode standar rumus (3).

1.4 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal (*ILOR*)

Pada buku kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (2017) yang berjudul *Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kabupaten Lumajang Tahun 2017* dijabarkan bahwa hubungan antara perubahan nilai output dengan penyerapan tenaga kerja dapat dirumuskan dalam indikator *ILOR (Incremental Labour Output Ratio)* dan Produktifitas Tenaga Kerja (PTK). Indikator *ILOR* atau disebut Rasio Tenaga Kerja – Output Marginal digunakan untuk melihat tambahan jumlah orang yang bekerja dengan adanya peningkatan satu satuan nilai PDRB. Sedangkan PTK untuk melihat seberapa besar kinerja dari setiap tenaga kerja dalam menghasilkan output.

ILOR adalah perbandingan antara perubahan tenaga kerja (ΔL) terhadap perubahan output (ΔY) perekonomian suatu wilayah. Perubahan tenaga kerja



merupakan selisih antara jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Sedangkan perubahan output didekati dengan selisih nilai tambah bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, selain menggambarkan tingkat efisiensi faktor tenaga kerja, juga dapat diketahui seberapa besar tenaga kerja yang dapat terserap per tahun jika terjadi penambahan output per satuan PDRB di suatu wilayah. *ILOR* dapat dinyatakan sebagai:

$$ILOR = \frac{\Delta L}{\Delta Y} \dots\dots\dots(5)$$

dimana:

ΔL) = penambahan/penyerapan tenaga kerja

(ΔY) = penambahan output (didekati dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan)

Dengan menggunakan rumus (5) dapat diperoleh nilai *ILOR* untuk masing-masing komponen per tahun. Untuk mendapatkan angka *ILOR* dalam periode tertentu digunakan metode rata-rata sederhana. Rumus *ILOR* yang digunakan untuk periode t hingga periode t+i adalah sebagai berikut:

$$ILOR = \frac{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta L}{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta Y} \dots\dots\dots(6)$$

Disamping itu dapat diketahui juga mengenai produktifitas tenaga kerja menggunakan indikator Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) yang dinyatakan sebagai berikut

$$PTK = \frac{Y}{L} \dots\dots\dots(7)$$

dimana:

Y = Output (didekati dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku)

L = Labour (Jumlah tenaga kerja)

Meskipun secara teori *ILOR* dapat dihitung secara tahunan, namun besaran ΔL maupun ΔY jika dihitung setiap tahun bisa menjadi bias ketika ada fluktuasi tahunan dalam penyerapan tenaga kerja maupun kinerja ekonomi pada



tahun tertentu ketika ada instabilitas. Oleh sebab itu, *I*LOR dihitung rata-rata per tahun dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahunan.

Besaran *I*LOR dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dikaitkan dengan peluang penyerapan tenaga kerja, *I*LOR bermakna positif dalam arti setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga semakin besar *I*LOR semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Tentunya, untuk melihat besarnya angkatan kerja yang tidak terserap masih harus melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kedua, jika dikaitkan dengan produktifitas maka semakin besar nilai *I*LOR berarti tenaga kerja semakin tidak produktif karena nilai PTK semakin kecil. Sehingga kondisi ideal yang ingin dicapai tentu nilai *I*LOR rendah dan pada saat yang sama nilai TPT juga rendah. Artinya sedikit pengangguran sedangkan para pekerja masih mampu menghasilkan barang/jasa secara optimal sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan tercapai atau telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Jika besaran *I*LOR bernilai negatif berarti dalam kurun waktu tertentu ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Ada kalanya telah terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi masih mampu menghasilkan nilai output yang cukup tinggi. Atau banyak tenaga kerja yang terserap tetapi justru terjadi penurunan nilai tambah bruto. Kedua hal tersebut akan sama-sama berdampak kurang baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Untuk daerah-daerah yang masih berkembang tentunya akan mengutamakan terserapnya tenaga kerja dalam jumlah besar terlebih dahulu pada tingkat produktifitas yang masih relatif baik.

Badan Pusat Statistik selaku penyedia data ketenagakerjaan melakukan survei Sakernas setiap dua tahun sekali yaitu untuk menggambarkan ketenagakerjaan pada Bulan Februari dan pada Bulan Agustus. Sampel yang digunakan pada Bulan Februari lebih sedikit, dan dipakai hanya untuk menggambarkan ketenagakerjaan wilayah provinsi saja, sedangkan pada bulan Agustus sampel yang dipakai lebih banyak dan bisa dipakai untuk menggambarkan



ketenagakerjaan sampai kabupaten/kota. Penghitungan *ILOR* triwulan I dihitung menggunakan data sakernas februari dan PDRB triwulan I. Estimasi olahan data sakernas sejak februari 2020 sudah menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015.

1.5 Elastisitas Tenaga Kerja

Anton Trianto (2017) menjabarkan bahwa secara teoritis terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas. Sementara keterkaitan erat juga ada pada tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah sehingga secara teori peningkatan ini menandakan adanya ekspansi dalam kegiatan produksi yang kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Tingkat Kesempatan Kerja adalah indikator yang menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dengan kata lain indikator ini menghitung peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dengan mencari persentase dari perbandingan antara jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rumus Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

$$TKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

Secara teoritis, ada tiga cara pokok untuk menciptakan kesempatan kerja atau berusaha dalam jangka panjang. Cara pertama adalah dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawaran tenaga kerja. Tetapi cara ini tidak memadai lagi bagi Indonesia karena angka kelahiran memang telah relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tenaga kerja kurang signifikan dalam jangka pendek. Cara kedua adalah dengan meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output



(*labour intensity of output*). Tetapi dalam jangka panjang, cara ini tidak selalu berhasil karena tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Cara ketiga adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi rumit, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan *crucial* untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga "ramah" terhadap ketenagakerjaan (Mahalli, 2008: 128).

Menurut Case dan Fair (2007: 109) dalam ilmu ekonomi, dengan logika sederhana kita dapat mengetahui bagaimana perubahan dalam suatu variabel, seperti harga barang atau tingkat bunga cenderung mempengaruhi perilaku. Begitu juga dalam penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB suatu sektor meningkat maka permintaan terhadap tenaga kerja di sektor tersebut juga akan meningkat begitu juga sebaliknya jika PDRB mengalami penurunan maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja di setiap sektor ekonomi tersebut. Hal ini akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: yaitu persentase pertumbuhan tenaga kerja per tahun dibanding dengan persentase pertumbuhan PDRB per tahun. Rumus koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas } PTK = \frac{\% \text{ pertumbuhan jumlah tenaga kerja}}{\% \text{ pertumbuhan ekonomi (PDRB)}} \dots\dots\dots(9)$$

Secara umum elastisitas adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besar pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain dalam kurun waktu tertentu dengan nilai Koefisien elastisitas berkisar antara nol dan tak terhingga. Perlu diingat dalam perhitungan nilai elastisitas tanda minus (-) atau plus (+) sering diabaikan karena nilai yang negatif dikarenakan perubahan variabel yang satu ke variabel yang lain adalah menggambarkan perubahan ke



arah yang berbalikan. Dengan mengadopsi konsep elastisitas, analisis perubahan penyerapan tenaga kerja akibat perubahan pertumbuhan ekonomi akan digolongkan menjadi lima jenis tipe elastisitas yaitu elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis, inelastis, dan uniter. Pada kasus elastisitas penyerapan tenaga kerja, penjelasan kategori elastisitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inelastis sempurna adalah perubahan PDRB tidak mengubah jumlah pertumbuhan jumlah tenaga kerja walaupun pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan atau penurunan. Nilai koefisien elastisitasnya adalah 0 (nol).
2. Elastis sempurna adalah apabila pertumbuhan jumlah tenaga kerja akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi pertumbuhan PDRB. Nilai koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga (∞).
3. Elastisitas uniter adalah elastisitas yang mempunyai Koefisien elastisitas permintaan sebesar 1 (satu). Elastisitas ini menggambarkan keadaan apabila persentase pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja.
4. Tidak elastis (inelastis) adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih besar dari pada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai Koefisien elastisitasnya kurang dari 1 (satu).
5. Elastis adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai Koefisien elastisitasnya lebih dari 1 (satu).



Infografis 1.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

<https://aceh.bps.go.id>

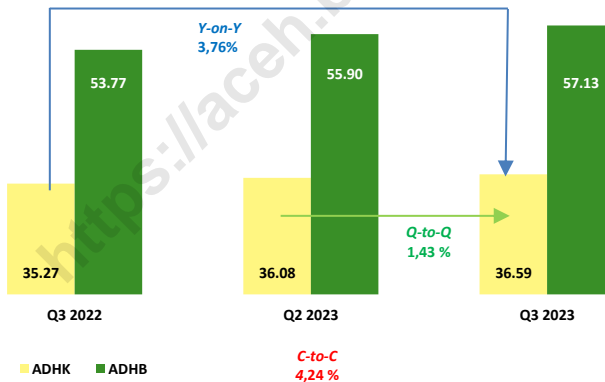
Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acehbpps.go.id>

II. TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

2.1 Nilai PDRB Total dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) pada umumnya selalu lebih tinggi daripada nilai PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). Perbedaan antara nilai PDRB ADHB dengan ADHK ini disebabkan karena penghitungan PDRB ADHB dipengaruhi oleh perubahan harga pada setiap tahunnya, sedangkan penghitungan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh perubahan harga karena hanya melihat pengaruh harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010.



Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 (Triliun Rupiah) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen)

Tinjauan PDRB secara tahunan (y-on-y) triwulan III tahun 2023 menggambarkan perkembangan PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2022. Perekonomian Aceh secara y-on-y pada triwulan III tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen, dengan nilai PDRB ADHK sebesar 36,59 triliun rupiah meningkat sekitar 1,33 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan III tahun 2022. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III





tahun 2023 diperoleh sebesar 57,13 triliun rupiah juga mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan III tahun 2023 yang hanya mencapai 53,77 triliun rupiah, hal ini berarti meningkat sekitar 3,35 triliun rupiah.

Kondisi PDRB triwulan III tahun 2023 secara kumulatif (c-to-c) mencapai pertumbuhan sebesar 4,24 persen. Triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2023 nilai PDRB ADHB mencapai 167,26 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 13,49 triliun rupiah dibandingkan dengan kondisi triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 yang hanya mencapai 153,77 triliun rupiah. Secara ADHK, nilai PDRB triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 mencapai 107,67 triliun rupiah mengalami kenaikan sekitar 4,38 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 yaitu hanya sebesar 103,29 triliun rupiah.

Adapun ekonomi Aceh secara triwulanan (q-to-q) yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023. Ekonomi Aceh juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 1,43 persen. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 1,25 triliun rupiah, sementara nilai PDRB ADHK pada triwulan III tahun 2023 meningkat sekitar 0,52 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan II tahun 2023.

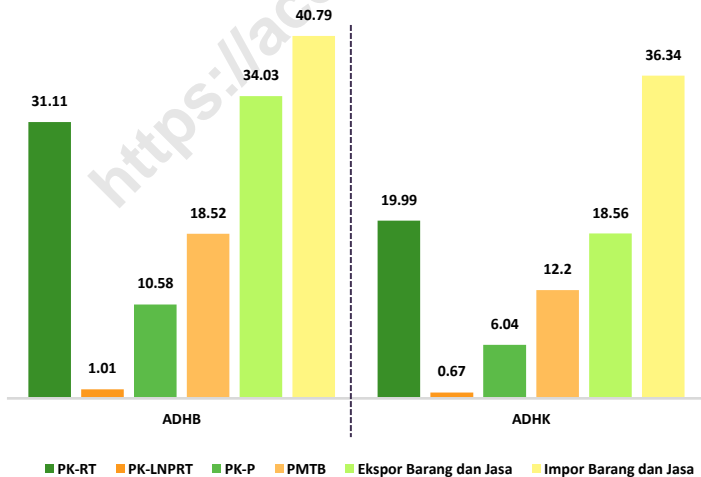
2.2 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, komponen impor barang dan jasa merupakan komponen pengurang terhadap PDRB total. Pada triwulan III tahun 2023, secara ADHB nilai PDRB komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang paling tinggi. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang menduduki peringkat kedua, dan nilai PDRB terbesar ketiga adalah komponen PMTB, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P). Secara ADHK 2010, nilai PDRB komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang paling tinggi, diikuti oleh ekspor barang dan jasa, dan pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P).



Secara detail dapat dijelaskan bahwa nilai PDRB ADHB dari PK-RT adalah sebesar 31,12 triliun rupiah dan secara ADHK diperoleh nilai PDRB sebesar 19,99 triliun rupiah. Komponen ekspor barang dan jasa dengan nilai PDRB ADHB mencapai 34,03 triliun rupiah, dan secara ADHK diperoleh sebesar 18,56 triliun rupiah. Komponen PMTB mempunyai nilai PDRB ADHB dan ADHK terbesar ketiga, yaitu masing-masing dengan nilai sebesar 18,52 triliun rupiah dan 12,20 triliun rupiah. Komponen berikutnya adalah PKP mempunyai nilai PDRB ADHB dan ADHK masing-masing sebesar 10,58 triliun rupiah dan 6,04 triliun rupiah.

Adapun Komponen LNPRT atau lembaga non profit rumah tangga mempunyai nilai PDRB ADHB dan ADHK sebesar 1,01 triliun rupiah dan 0,67 triliun rupiah. Komponen impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang terhadap PDRB total mempunyai nilai PDRB ADHB dan ADHK yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 40,79 triliun rupiah dan 36,34 triliun rupiah.



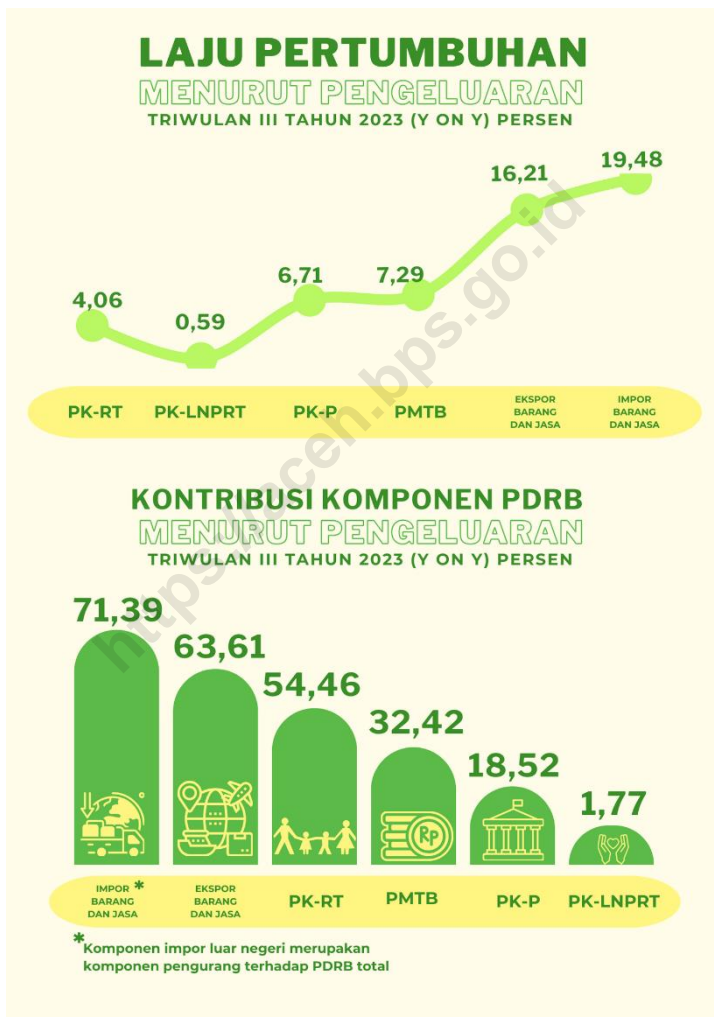
Gambar 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh menurut Pengeluaran Triwulan III Tahun 2023 (Triliun Rupiah)

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



Infografis 2.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

<https://achhubs.go.id>

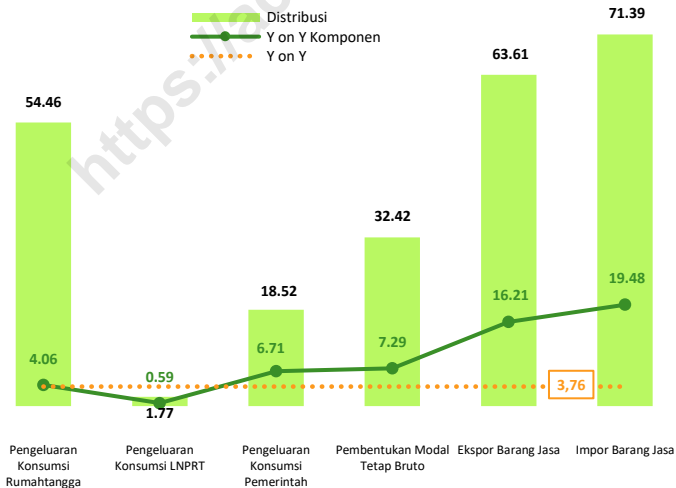
Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

III. PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y*

Perekonomian Aceh secara *y-on-y* mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 3,76 persen. Berdasarkan PDRB pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang jasa yaitu sebesar 16,21 persen, komponen berikutnya yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah pada komponen PMTB yaitu sekitar 7,29 persen. komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi komponen ketiga tertinggi, yaitu mencapai 6,71 persen, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 4,06 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang PDRB total mengalami pertumbuhan sebesar 19,48 persen.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi *y-on-y* dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2023 (Persen)



Secara y-on-y, kenaikan laju pertumbuhan impor barang dan jasa dipengaruhi oleh impor barang dan jasa antar daerah yang mengalami kenaikan, sedangkan impor barang luar negeri mengalami penurunan dan impor jasa luar negeri mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan impor luar negeri menjadi faktor pengurang terhadap PDRB total. Secara distribusi, peranan komponen impor barang dan jasa terhadap total PDRB juga tinggi, yaitu sekitar 71,39 persen.

Pada triwulan III tahun 2023, kegiatan ekspor mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III tahun 2022. Pada triwulan III tahun 2023, Aceh sudah mulai melakukan kembali ekspor migas luar negeri, untuk ekspor non migas luar negeri mengalami penurunan sehingga secara total tidak lebih besar dari triwulan yg sama tahun sebelumnya. Ekspor jasa luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan, dipengaruhi oleh jumlah wisatawan mancanegara yang mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan III tahun 2022. Dari sisi distribusi, ekspor barang dan jasa juga memberikan peranan yang besar yaitu sekitar 63,61 persen.

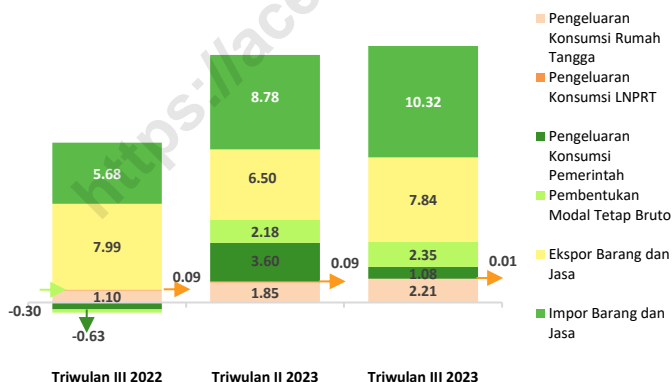
Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT secara y-on-y mengalami pertumbuhan sekitar 0,59 persen pada triwulan III tahun 2023. Meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, diantaranya adalah meningkatnya kegiatan beberapa partai politik dan kegiatan di masjid selama perayaan maulid nabi. Jika dilihat secara distribusi, komponen PK-LNPRT memberikan peranan yang kecil yaitu hanya sebesar 1,77 persen.

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan yaitu sekitar 4,06 persen. Mobilitas masyarakat yang sudah lebih ramai merupakan pengaruh utama peningkatan komponen ini. Perayaan keagamaan yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, juga merupakan faktor utama meningkatnya komponen ini. Dari sisi distribusi, pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan peranan yang sangat besar terhadap total PDRB yaitu sekitar 54,46 persen.



Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan peranan yang cukup besar yaitu sekitar 32,42 persen. Pertumbuhan komponen PMTB sekitar 7,29 persen, berdasarkan subkomponennya, PMTB bangunan mengalami pertumbuhan sedangkan PMTB non-bangunan mengalami penurunan. Salah satu penyebab utama menurunnya PMTB non-bangunan adalah tidak adanya kegiatan impor barang mesin/peralatan, sedangkan pada triwulan III tahun 2022, terdapat kegiatan impor barang mesin/perengkapan tersebut.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) pada triwulan III tahun 2023 juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 6,71 persen. Kegiatan penyerapan anggaran yang cukup besar dibandingkan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya merupakan penyebab utama kenaikan komponen ini. Peranan komponen PKP juga cukup mempengaruhi total PDRB yaitu sekitar 18,52 persen.



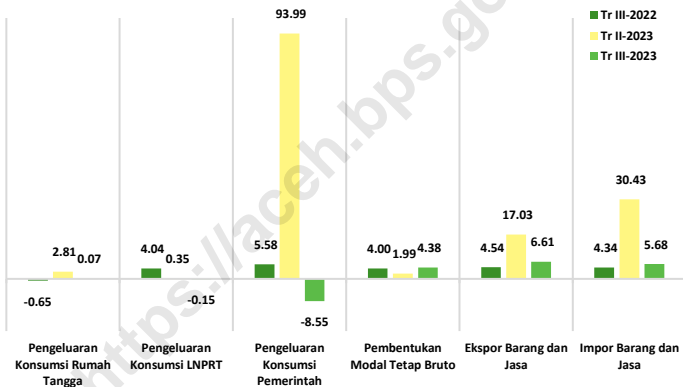
Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh y-on-y (Persen)

Berdasarkan sumbernya, pada triwulan III tahun 2023 semua komponen pengeluaran memberikan sumber pertumbuhan positif. Komponen yang memberikan sumber pertumbuhan paling besar adalah ekspor barang dan jasa (Gambar 4).



3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *q-to-q*

Perekonomian Aceh pada triwulan III tahun 2023 mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,43 persen dibandingkan triwulan II tahun 2023. Jika dilihat secara detail, pertumbuhan terjadi pada 4 komponen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 6,61 persen, diikuti oleh komponen impor barang dan jasa yaitu sekitar 5,68 persen, namun komponen ini merupakan komponen pengurang terhadap PDRB total.



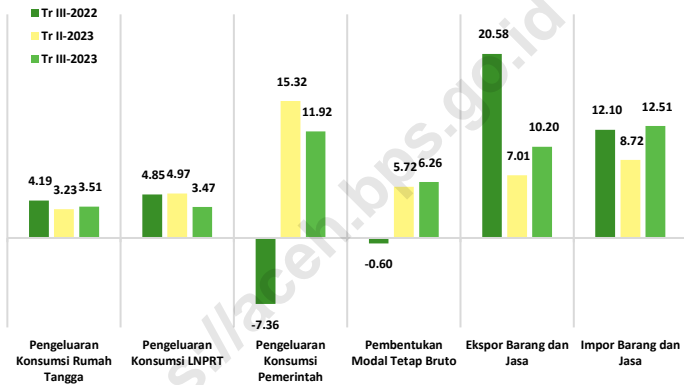
Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran Aceh *q-to-q* (Persen)

Komponen lainnya, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pembentukan modal tetap bruto, masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 persen dan 4,38 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah komponen lembaga non profit yang melayani rumah tangga dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, masing-masing sebesar 0,15 persen dan 8,55 persen.



3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh c-to-c

Kondisi perekonomian Aceh kumulatif dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 dibandingkan kumulatif dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sekitar 4,24 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi secara c-to-c dapat dilihat pada Gambar 6. Semua komponen mengalami pertumbuhan.



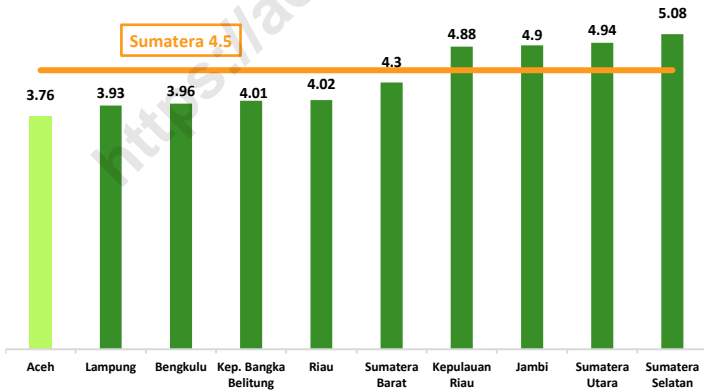
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran Aceh c-to-c (Persen)

Komponen PKP mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 11,92 persen, diikuti oleh ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 10,20 persen, diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yang mengalami pertumbuhan paling tinggi ketiga yaitu mencapai 6,26 persen, sedangkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang PDRB total mengalami pertumbuhan sebesar 12,51 persen.



3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

Perkembangan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan III tahun 2023 secara tahunan (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,50 persen dibanding dengan triwulan III tahun 2022. Jika dilihat secara detail, semua provinsi di wilayah Sumatera mengalami pertumbuhan (Gambar 7). Terdapat 4 (empat) provinsi yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan Pulau Sumatera; paling tinggi adalah Sumatera Selatan sebesar 5,08 persen; Sumatera Utara sebesar 4,94 persen; Jambi sebesar 4,9 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 4,88 persen. Provinsi lainnya mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera. Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi regional Sumatera dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini:

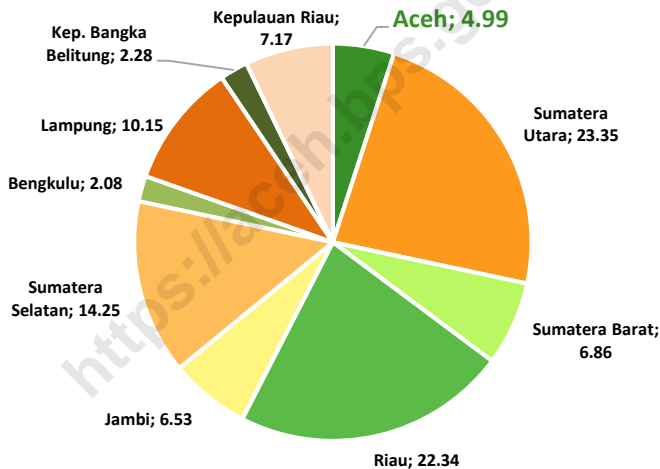


Gambar 7. Pertumbuhan PDRB (y-on-y) Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 (Persen)

Selanjutnya, kontribusi PDRB provinsi-provinsi di wilayah Regional Sumatera dapat disajikan pada Gambar 8. Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-



masing sebesar 23,35 persen, 22,34 persen, dan 14,25 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari PDRB Regional Sumatera triwulan III tahun 2023 berasal dari tiga provinsi tersebut. Provinsi dengan kontribusi terkecil terhadap PDRB Regional Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung yaitu berkontribusi masing-masing 2,08 persen dan 2,28 persen. Sementara itu, Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,99 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan III tahun 2023 y-on-y (Gambar 8).

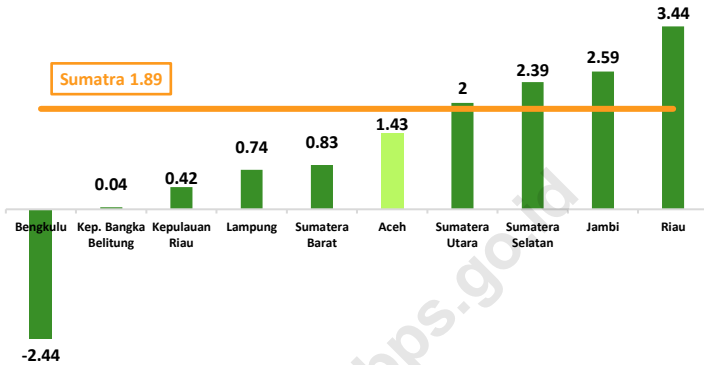


Gambar 8. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera Triwulan III tahun 2023 y-on-y (Persen)

Secara q-to-q, ekonomi regional Sumatera mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,89 persen. Hampir semua provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan. Provinsi yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 3,44 persen, 2,59 persen, 2,39 persen, dan 2,00 persen. Sementara itu, provinsi lainnya,

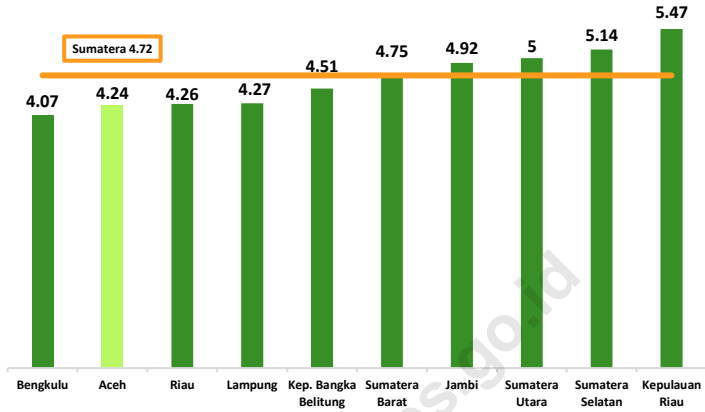


mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera. Aceh sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen (Gambar 9).



Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB q-to-q Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 (Persen)

Adapun perkembangan ekonomi secara c-to-c, yaitu kondisi kumulatif triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 dibandingkan dengan kumulatif triwulan I sampai triwulan III tahun 2022, Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 4,72 persen. Semua provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan, terdapat 5 (lima) provinsi yang mengalami pertumbuhan di atas Pulau Sumatera; Provinsi Kepulauan Riau 5,47 persen; Sumatera Selatan 5,14 persen; Provinsi Jambi 4,92 persen dan Provinsi Sumatera Barat 4,75 persen. Sementara provinsi lainnya berada di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera. (Gambar 10).



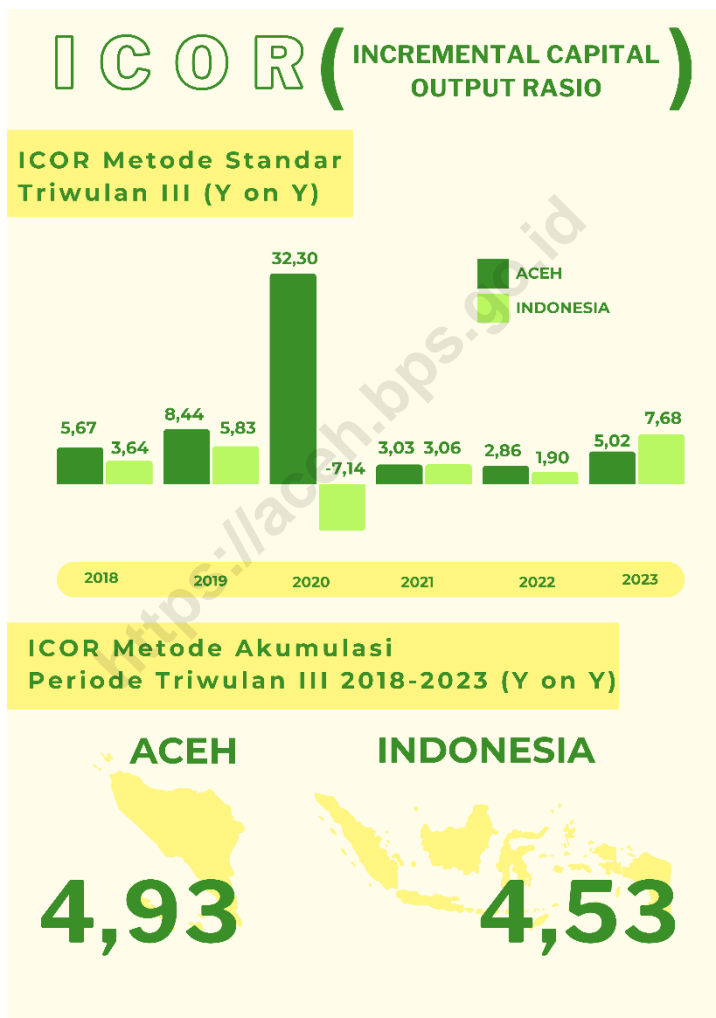
Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB c-to-c Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2023 (Persen)

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acen.bps.go.id>



Infografis 3.

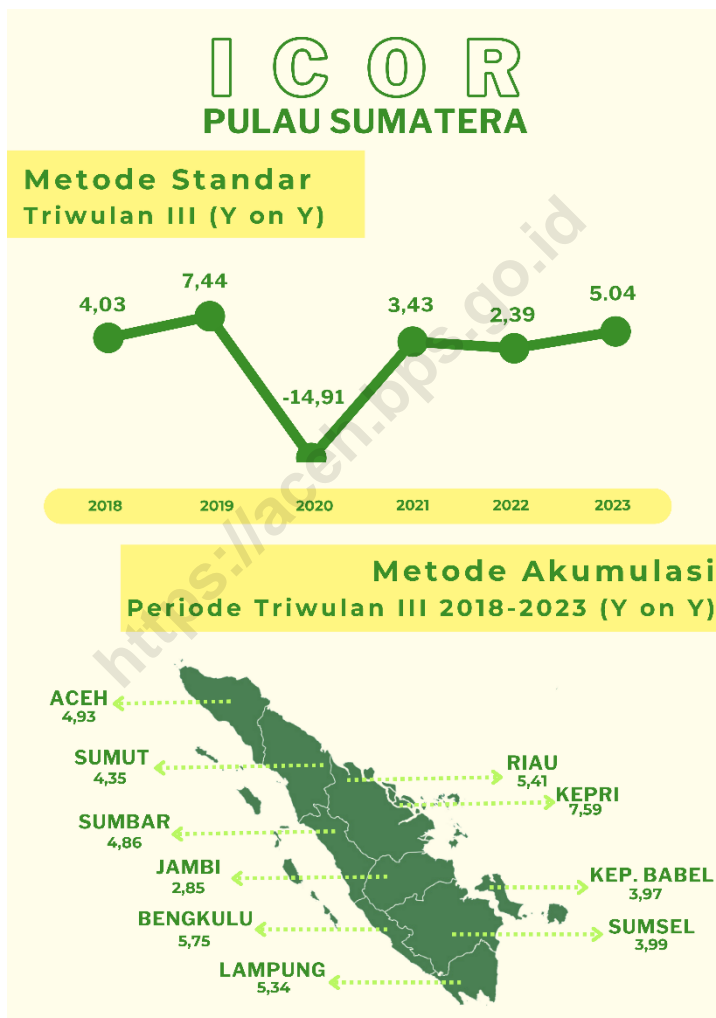


Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acehbps.go.id>



Infografis 4.



<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan



ANALISIS ICOR

<https://aceh.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acehbps.go.id>



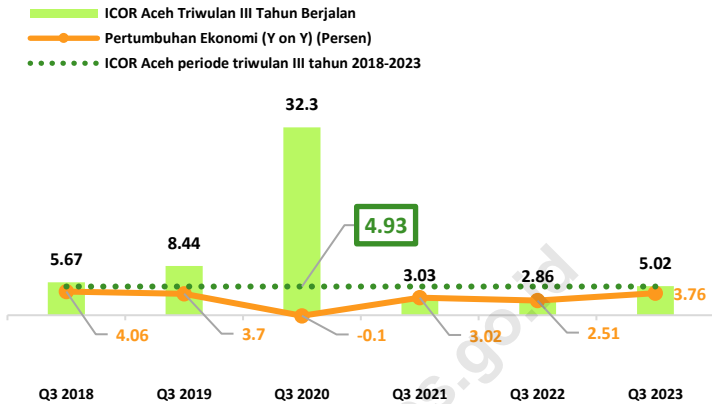
IV. ANALISIS *ICOR*

Koefisien *ICOR* adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output (dalam hal ini PDRB). Tinggi rendahnya *ICOR* juga mencerminkan tinggi rendahnya biaya ekonomi atas investasi agregatif. Tambahan kapital (investasi) baru ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Besaran *ICOR* diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan PDRB. Nilai PMTB dan tambahan PDRB diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Aceh. Semakin tinggi nilai *ICOR*, semakin banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan PDRB. Besaran koefisien *ICOR* mencerminkan produktivitas PMTB yang pada akhirnya berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, semakin kecil koefisien *ICOR* menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi.

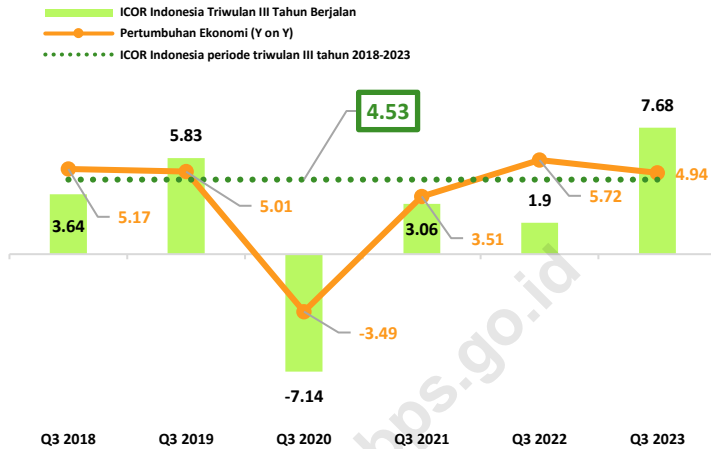
Pada Gambar 11, menunjukkan bahwa koefisien *ICOR* Aceh periode triwulan III tahun 2018-2023 selalu bernilai positif, akan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2020. Seperti diketahui bahwa pada triwulan III tahun 2020, pandemi covid-19 memberikan dampak buruk pada perekonomian, sehingga penanaman modal baru tidak mampu menghasilkan PDRB secara optimal. Seiring dengan melandainya pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi semakin membaik yaitu mencapai 3,76 persen pada triwulan III tahun 2023, dengan koefisien *ICOR* sebesar 5,02. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan sekitar 5,02 unit PMTB untuk menaikkan 1 unit PDRB.

Nilai *ICOR* secara triwulanan pada tahun berjalan menunjukkan angka yang fluktuatif. Oleh sebab itu, dilihat juga perkembangan nilai *ICOR* secara periodik. Berdasarkan Gambar 11, dapat diketahui bahwa nilai *ICOR* Provinsi Aceh triwulan III secara kumulatif periode tahun 2018-2023 adalah sebesar 4,93. Ini berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit pada periode triwulan III tahun 2018-2023 dibutuhkan PMTB sebesar 4,93 unit.



Gambar 11. ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2018-2023

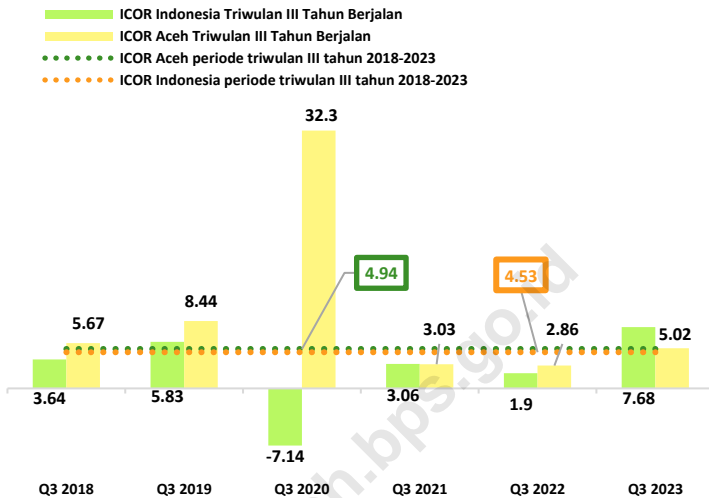
Pada Gambar 12, koefisien ICOR Indonesia selama periode triwulan III tahun 2018-2023 juga hampir selalu bernilai positif, kecuali pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi juga sempat mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2023 diperoleh sekitar 4,94 persen dengan ICOR 7,68. Ini berarti bahwa dibutuhkan PMTB sebesar 7,68 unit untuk menaikkan 1 unit PDRB.



Gambar 12. ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Indonesia Triwulan III Tahun 2018-2023

Jika dilihat secara periodik, koefisien *ICOR* Indonesia selama periode triwulan III tahun 2018-2023 sebesar 4,53. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode tersebut, dibutuhkan PMTB sebesar 4,53 unit.

Selama periode triwulan III tahun 2018-2023, jika dibandingkan nilai *ICOR* Provinsi Aceh dengan nilai *ICOR* Indonesia, maka didapatkan bahwa *ICOR* Aceh baik secara periodik maupun triwulanan, secara umum menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai *ICOR* Indonesia. Hal ini berarti bahwa efisiensi penanaman modal di Provinsi Aceh masih belum optimal dibandingkan dengan efisiensi rata-rata penanaman modal seluruh provinsi di Indonesia (Gambar 13).



Gambar 13. Perbandingan *ICOR* Aceh dan Indonesia Triwulan III Tahun 2018-2023 (*y-on-y*)

Selanjutnya, pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan *ICOR* di wilayah Regional Sumatera periode triwulan III tahun 2018-2023 metode standar. Diketahui bahwa secara total provinsi yang ada di pulau sumatera, nilai *ICOR* pada triwulan III tahun 2020 didapatkan dengan nilai *ICOR* yang bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pandemi Covid-19 merupakan penyebab utama terjadinya penurunan nilai PDRB ADHB ini. Jika dilihat secara detail, hanya Provinsi Aceh dan Bengkulu yang mempunyai *ICOR* bernilai positif, dengan nilai yang sangat besar signifikan yaitu masing-masing mencapai 32,30 dan 34,88. Sedangkan Pulau Sumatera *ICOR* triwulan III tahun 2020 adalah negatif 14,91.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, dan masa pandemi Covid-19 yang dinyatakan sudah berakhir. Nilai *ICOR* metode standar Pulau Sumatera terus bernilai positif dan mengecil, pada triwulan III tahun 2021 sebesar 3,43, triwulan III tahun 2022 sebesar 2,39, namun pada triwulan III tahun 2023

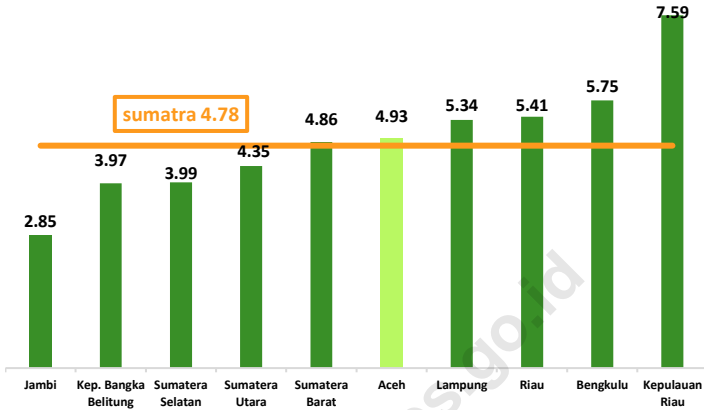


kembali naik menjadi 5,04. Pada triwulan III tahun 2023, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh *ICOR* paling kecil yaitu 2,79.

Tabel 1. Perkembangan Nilai *ICOR* Provinsi di Sumatera Periode Triwulan III Tahun 2018-2023 Metode Standar

Provinsi	Triwulan III					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,67	8,44	32,30	3,03	2,86	5,02
Sumatera Utara	4,28	4,23	(296,26)	4,54	2,78	3,37
Sumatera Barat	4,11	4,37	(8,07)	7,03	2,22	4,02
Riau	3,61	(14,00)	(10,28)	2,26	2,23	13,94
Jambi	2,28	7,25	(3,73)	1,46	1,20	5,00
Sumatera Selatan	4,08	4,87	(25,94)	3,86	1,82	3,70
Bengkulu	4,67	5,08	34,88	5,65	3,41	7,81
Lampung	3,95	5,04	(20,01)	6,29	3,08	4,55
Kep. Bangka Belitung	4,61	8,19	(11,58)	1,90	3,15	2,79
Kepulauan Riau	5,17	7,26	(6,23)	5,79	3,46	8,00
SUMATERA	4,03	7,44	(14,91)	3,43	2,39	5,04

Nilai *ICOR* triwulan III pada tahun berjalan (metode standar) untuk Regional Sumatera dapat diperhatikan bahwa bernilai fluktuatif dan terdapat beberapa nilai *ICOR* yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, terutama pada triwulan III tahun 2020. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan juga nilai *ICOR* secara periodik (metode akumulasi) untuk menghindari terdapatnya nilai *ICOR* yang ekstrim. Gambar 14 menunjukkan bahwa nilai *ICOR* akumulasi Pulau Sumatera beserta dengan masing-masing provinsi periode triwulan III tahun 2018-2023. *ICOR* Regional Sumatera bernilai sebesar 4,78 yang didapatkan dari perbandingan total PMTB dan perubahan total PDRB ADHB provinsi yang ada di wilayah Regional Sumatera periode triwulan III tahun 2018-2023. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara umum, Regional Sumatera membutuhkan 4,78 unit PMTB untuk mampu menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode tersebut.



Gambar 14. ICOR Provinsi di Wilayah Sumatera Metode Akumulasi Triwulan III Tahun 2018-2023 (y-on-y)

Nilai *ICOR* paling tinggi di Sumatera selama periode Triwulan III tahun 2018-2023 adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai *ICOR* mencapai 7,59 yang berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit dibutuhkan sebesar 7,59 unit PMTB. Sementara itu nilai *ICOR* paling kecil diperoleh Provinsi Jambi dengan nilai 2,85, yang berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit dibutuhkan 2,85 unit PMTB. Adapun Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau adalah Provinsi dengan nilai *ICOR* di atas nilai *ICOR* Sumatera, sedangkan provinsi lainnya memperoleh nilai *ICOR* di bawah total *ICOR* Sumatera. Adapun nilai *ICOR* yang dapat dikatakan sudah menunjukkan terjadinya produktivitas investasi yang baik, adalah jika nilai *ICOR* berada pada interval 3-4.



<https://aceh.bps.go.id>

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://ceh.bps.go.id>



Lampiran 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Triliun Rupiah)

Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27,36	28,74	28,88	28,88	29,83	30,97	31,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,94	0,95	0,99	1,01	1,01	1,01	1,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,51	9,10	9,69	13,32	5,80	11,68	10,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,18	16,26	16,88	17,67	17,18	17,62	18,52
5. Perubahan Inventori	0,12	0,06	-0,04	0,14	0,54	-0,64	0,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	27,84	29,51	30,78	32,49	28,99	35,29	36,34
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29,82	32,76	33,40	35,53	29,10	40,04	40,79
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	48,13	51,86	53,78	57,98	54,25	55,90	57,13

Lampiran 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Triliun Rupiah)

Komponen	Atas Dasar Harga Konstan						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18,84	19,34	19,21	18,93	19,43	19,98	19,99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,64	0,64	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,32	5,36	5,66	7,61	3,40	6,60	6,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,96	10,94	11,37	11,86	11,46	11,69	12,20
5. Perubahan Inventori	0,06	0,03	-0,02	0,09	0,34	-0,34	0,19
6. Ekspor Barang dan Jasa	15,88	16,36	17,07	18,16	15,89	18,60	19,83
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	16,24	18,09	18,69	19,66	16,20	21,13	22,33
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	33,45	34,57	35,27	37,66	35,00	36,08	36,59



Lampiran 3. Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2022 sampai Triwulanan-2023 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan C to C						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,44	5,33	4,19	-0,11	3,14	3,23	3,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,24	4,74	4,85	3,02	5,14	4,97	3,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,06	-9,60	-7,36	-3,89	2,59	15,32	11,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,44	-0,44	-0,60	-0,47	4,55	5,72	6,26
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	10,90	21,34	20,58	17,90	0,09	7,01	10,20
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	9,46	12,33	12,10	9,00	-0,27	8,72	12,51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,25	4,35	3,72	2,17	2,17	4,63	4,50

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan y-on-y PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan Y on Y						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,44	4,27	2,01	-0,60	3,14	3,31	4,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,24	5,25	5,07	5,94	5,14	4,81	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,06	-15,14	-3,70	4,42	2,59	23,20	6,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,44	-0,43	-0,90	-0,93	4,55	6,90	7,29
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	10,90	33,54	19,19	35,02	0,09	13,73	16,21
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	9,46	15,03	11,68	17,79	-0,27	16,79	19,48
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,25	4,44	2,51	5,60	4,63	4,37	3,76

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan <i>Q to Q</i>						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,07	2,64	-0,65	-1,47	2,65	2,81	0,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,04	0,67	4,04	1,11	-0,72	0,35	-0,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-54,50	61,54	5,58	34,54	-55,29	93,99	-8,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-8,43	-0,24	4,00	4,26	-3,36	2,01	4,38
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	18,09	2,99	4,34	6,40	-12,46	17,03	6,61
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-2,71	11,38	3,30	5,22	-17,63	30,43	5,68
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-6,20	3,34	2,02	6,78	-7,06	3,08	1,43

Lampiran 6. Indeks Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)

Komponen	Indek Implisit						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	145,21	148,61	150,34	152,58	153,50	155,04	155,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	146,71	147,73	148,44	148,53	149,80	149,93	150,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	166,25	169,83	171,23	175,07	170,42	176,96	175,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	147,57	148,74	148,40	149,05	149,94	150,72	151,79
5. Perubahan Inventori	205,43	206,02	206,03	153,99	160,00	187,37	188,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	175,34	180,43	180,38	178,94	182,37	189,74	183,24
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	183,58	181,09	178,74	180,71	179,63	189,53	182,67
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	143,87	150,03	152,48	153,97	154,99	153,50	155,04



Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit *q-to-q* PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)

Komponen	Laju Indeks Implisit <i>Q to Q</i>						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,23	2,34	1,16	1,49	0,60	1,00	0,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,74	0,69	0,48	0,06	0,86	0,09	0,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,05	2,16	0,82	2,24	-2,66	3,84	-0,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,81	0,79	-0,23	0,44	0,60	0,52	0,71
5. Perubahan Inventori	0,29	0,29	0,00	-25,26	3,90	17,10	0,49
6. Ekspor Barang dan Jasa	0,20	2,90	-0,03	-0,79	1,91	4,04	-3,42
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-1,60	-1,36	-1,29	1,10	-0,60	5,51	-3,62
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,00	4,28	1,63	0,98	0,66	-0,03	0,76

Lampiran 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan 2022-2023

Komponen	Distribusi						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,84	55,41	53,71	49,81	54,98	55,41	54,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,95	1,83	1,85	1,73	1,86	1,81	1,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,46	17,54	18,01	22,98	10,69	20,90	18,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,61	31,36	31,39	30,48	31,68	31,52	32,42
5. Perubahan Inventori	0,24	0,12	-0,08	0,24	0,99	-1,14	0,61
6. Ekspor Barang dan Jasa	57,85	56,90	57,24	56,04	53,44	63,14	63,61
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	61,95	63,16	62,12	61,28	53,64	71,63	71,39
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2022-2023 (Persen)

Komponen	Sumber Pertumbuhan <i>Y on Y</i>						
	2022				2023		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,55	2,39	1,10	-0,32	1,77	1,85	2,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,08	0,10	0,09	0,11	0,10	0,09	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,11	-2,89	-0,63	0,90	0,26	3,60	1,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,15	-0,14	-0,30	-0,31	1,49	2,18	2,35
5. Perubahan Inventori	0,17	-0,28	-0,06	0,35	0,84	-1,07	0,59
6. Ekspor Barang dan Jasa	4,86	12,41	7,99	13,20	0,04	6,50	7,84
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	4,38	7,14	5,68	8,33	-0,13	8,78	10,32
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,25	4,44	2,51	5,60	4,63	4,37	3,76

Lampiran 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan III-2023

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB Triwulan III-2023 (Triliun Rupiah)	Kontribusi Terhadap Pulau Sumatera Triwulan III-2023 (Persen)	Laju Pertumbuhan Triwulan III-2023 (Persen)		
			<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	57,19	4,99	1,43	3,76	4,24
Sumatera Utara	267,30	23,35	2,00	4,94	5,00
Sumatera Barat	78,49	6,86	0,83	4,30	4,75
Riau	255,78	22,34	3,44	4,02	4,26
Jambi	74,77	6,53	2,59	4,90	4,92
Sumatera Selatan	163,13	14,25	2,39	5,08	5,14
Bengkulu	23,76	2,08	-2,44	3,96	4,07
Lampung	116,25	10,15	0,74	3,93	4,27
Kep. Bangka Belitung	26,13	2,28	0,04	4,01	4,51
Kepulauan Riau	82,10	7,17	0,42	4,88	5,47
SUMATERA	1.144,84	100,00	1,89	4,50	4,72

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

<https://ach.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>



- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan III-2022. Banda Aceh.
- , 2022. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan I-2023. Banda Aceh.
- Case, dan Fair. 2005. Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro, Edisi IX, (Alih Bahasa Barlian Muhamad). PT INDEKS. Jakarta.
- Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik. Penyusunan Indikator Ekonomi. Incremental Capital Output Ratio 2011. 2012. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012, hlm.83-95*. Yogyakarta.
- Dornbusch, Rudiger & Fischer. 2004. Macroeconomics (9th ed). *Mc Graw – Hill Companies*. New York.
- European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. 2009. SNA 2008. New York.
- Mankiw, N, Gregory. 2001. Teori Ekonomi Makro. Edisi 7. Tahun 2000. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses. Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Tison Arif. 2011. Pengaruh efisiensi perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi 32 provinsi di Indonesia. Jurnal skripsi.
- Siwu, dkk. 2021. Analisis Incremental Capital Output Ratio Sektor Unggulan di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.21, No. 05 Oktober 2021. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas EKonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- <https://www.aceh.bps.go.id> dan <https://www.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://aceh.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh
Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632
Homepage: <http://aceh.bps.go.id>
Email: bps1100@mailhost.bps.go.id

